



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# SISTEM AKUNTANSI PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

*Disusun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau*



OLEH :

**SELLI MARSELA**  
**NIM. 01770423464**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN****TUGAS AKHIR**

Nama : SELLI MARSELA  
 NIM : 01770423464  
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Program Studi : D III AKUNTANSI  
 Judul : **SISTEM AKUNTANSI PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa ini sudah dapat di setujui:

Pekanbaru, 11 MEI 2020

**Disetujui,  
Pembimbing**

Identiti SE, M. Ak

NIP. 19690623 200901 2 004

Mengetahui,

Dekan

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan

Faiza Muklis, SE, M.Si, AK  
 NIP. 19741108 200003 2 004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : SELLI MARSELA

NIM : 01770423464

PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

JUDUL : **SISTEM AKUNTANSI PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

HARI/TANGGAL : Selasa, 19 Mei 2020

DISAHKAN OLEH

KETUA PENGUJI

**Nasrullah Diamil, SE, M.Si, Ak, CA**  
NIP. 19780808 200710 1003

PENGUJI I

**Elisanovi, SE, MM, Ak, CA**  
NIP. 19680823 201411 2 001

PENGUJI II

**Anna Nurlita, SE, M.Si**  
NIK. 130 717 123



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **ABSTRAK**

### ***SISTEM AKUNTANSI PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI***

**OLEH : SELLI MARSELA**

*Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pengurus Program Keluarga Harapan (Korkab) Dinas Sosial menangani kegiatan penyaluran dan sejarah dari Kantor Dinas Sosial. Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan sistem pencairan non tunai , sedangkan penyaluran dana menggunakan bank mandiri. Sistem Akuntansi merupakan alat yang digunakan Dinas Sosial yang bertujuan memudahkan dalam pencairan dan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Dalam hasil penelitian ini Dinas Sosial sudah melakukan sistem pencairan dan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan baik.*

**Kata kunci : Sistem Akuntansi, Pencairan, Penyaluran Dana**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbal'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi**. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa Terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua penulis Ayahanda Khairul Usman dan Ibunda Simarni, yang senantiasa memberikan Do'a restunya, motivasi, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kepada kakak Rani Patriani dan adik Radiyen meisel, Yolla es meralda yang telah memberikan dukungan serta cinta dan kasih sayangnya. Beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bapak Prof, Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau beserta Staf Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
5. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak. CA, selaku Sekretaris Jurusan D-III Akuntansi.
7. Ibu Identiti, SE, M.Ak, Ak CA, selaku dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan dan masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
9. Bapak Erick Maison Putra SE. M,Si , Bapak Sisrianto S,IP. M,Si dan seluruh Pegawai Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat seperjuangan urang awak Inka Bella, Rifiqa Auliah, Indah Roisyatun, Eka Risky, Natasya, Ajeng , Ferdila terimakasih atas kebersamaan selama kuliah.
11. Sahabat Dhea Rizky teman seperjuangan bimbingan terimakasih atas segala bantuan.
12. Teman teman lokal A D3 akuntansi terimakasih atas kebersamaannya.
13. Teman dekat Edo Prasetyo terimakasih atas bantuan selama kuliah dan kebersamaannya.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam penulisan laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama penyusunan tugas akhir ini, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun agar penulisan tugas akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana memperluas ilmu pengetahuan. Amin yaa Rabbal'alamin.

Pekanbaru , Mei 2020  
Penulis

**Selli Marsela**

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>LAMPIRAN DATA .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1. 1 Latar Belakang .....	1
1. 2 Rumusan Masalah .....	4
1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1. 4 Metode Penelitian .....	5
1. 5 Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	 <b>8</b>
2. 1 Sejarah Singkat dan Dasar Hukum Dinas Sosial .....	8
2.1.1 Visi dan Misi Dinas Sosial .....	10
2. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi .....	10
2. 3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial .....	12
 <b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK .....</b>	 <b>40</b>
3. 1 Tinjauan Teori .....	40
3.1.1 Pengertian Sistem .....	40
3.1.2 Pengertian Akuntansi .....	42
3.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi .....	44
3.1.4 Pengertian Program Keluarga Harapan .....	46
3. 2 Tinjauan Praktek .....	49
3.2.1 Alur Penyaluran Distribusi Kartu Keluarga Harapan .....	49
3.2.2 Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan .....	50
3.2.3 Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan .....	52
3.2.4 Sistem Pencairan/Penarikan Dana Program Keluarga Harapan .....	58



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.5 Pemberitahuan Status Rekening Bank Penyalur.....	60
3.2.6 Penarikan/Pencairan Dana Program Keluarga Harapan.....	61
3.2.7 Prosedur Perhitungan Dana Program Keluarga Harapan.....	62

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4. 1 Kesimpulan .....	67
4. 2 Saran .....	68

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Jam Buka Operasioanal Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi .....	9
Tabel III.1	Penyaluran Tahap Pertama Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan .....	55
Tabel III.2	Penyaluran Tahap Kedua Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan .....	56
Tabel III.3	Penyaluran Tahap Ketiga Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan .....	57
Tebel III.4	Data Penerima Program Program Keluarga Harapan .....	65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.... 11



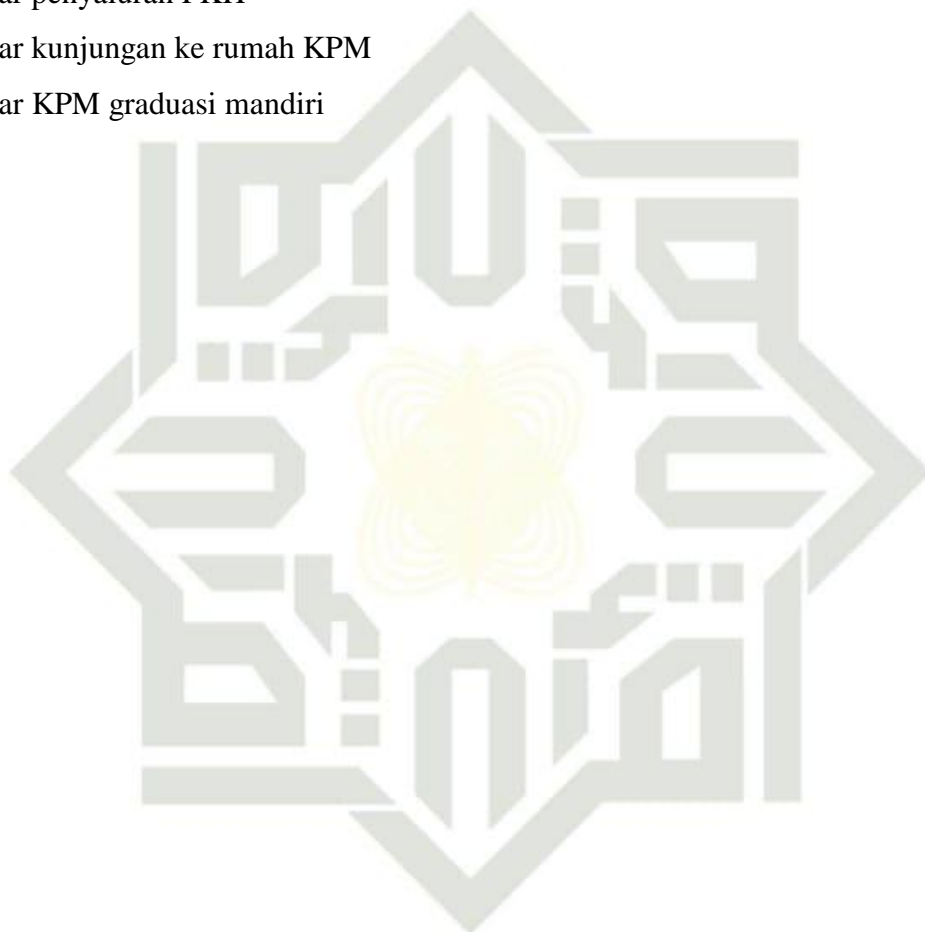


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

1. Daftar wawancara
2. Gambar kegiatan wawancara
3. Gambar penyaluran PKH
4. Gambar kunjungan ke rumah KPM
5. Gambar KPM graduasi mandiri



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN DATA

- 1.1 Laporan rekap penyaluran bantuan PKH 2019 tahap pertama
- 1.2 Laporan tindak lanjut masalah yang tidak tersalurkan tahap pertama
- 1.3 Laporan bantuan belum tersalurkan tahap pertama
- 1.4 Laporan update bantuan yang sudah tersalurkan tahap pertama
- 1.5 Laporan rekap penyaluran bantuan PKH 2019 tahap kedua
- 1.6 Laporan tindak lanjut masalah yang tidak tersalurkan tahap kedua
- 1.7 Laporan bantuan belum tersalurkan tahap kedua
- 1.8 Laporan update bantuan yang sudah tersalurkan tahap kedua
- 1.9 Laporan rekap penyaluran bantuan PKH 2019 tahap ketiga
- 1.10 Laporan tindak lanjut masalah yang tidak tersalurkan tahap ketiga
- 1.11 Laporan bantuan belum tersalurkan tahap kedua
- 1.12 Laporan update bantuan yang sudah tersalurkan tahap kedua
- 1.13 Data penerima bantuan PKH 2020



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah yang biasa disebut dengan sebutan kolektif meliputi suatu kerja atau satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi Negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah yang meliputi juga Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Pemerintah.

Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu instansi penyaluran dan program keluarga harapan yang akan disebar luaskan ke seluruh kecamatan yang ada di kabupaten kuantan singingi. Penyaluran dana program keluarga harapan yang ada di dinas sosial kabupaten kauntan singing mengalami tingkat pengontrolan dan transparansi yang rendah. Pemerintah melakukan penanggulangan kemiskinan dengan membuat kebijakan dan program pemerintah sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), program perlindungan sosial atau dikenal didunia internasional dengan Conditional Cash Transfer.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) diolah oleh Pusat Data dan Infomasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kessos ) kementerian sosial RI selanjutnya ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemensos RI. Program Keluarga Harapan (PKH) suatu keharusan yang dijalankan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan agar lebih terencana dan terarah.

Bantuan tunai bersyarat yakni sebuah program keluarga harapan (PKH) memiliki ketentuan dalam memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat diantaranya merupakan keluarga sangat miskin (KSM) dan tercatat di dalam basis data terpadu hasil pendapatan program perlindungan sosial (PPLS) yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Para penerima bantuan sedikitnya harus memenuhi kriteria kepesertaan program yaitu memiliki ibu hamil /nifas/anak balita, memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra-sekolah), anak usia 7 sampai 12 tahun, anak usia 12 sampai 15 tahun, anak usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak disabilitas, dan para lanjut usia dimulai dari 60 tahun.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) para penerima bantuan yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan didampingi oleh para petugas pendamping. Peran petugas pendamping disini merupakan jembatan bagi para KPM atas ketidakpahaman mengenai program bantuan. Program PKH merupakan bantuan tunai yang diterima para KPM tetapi sistem informasi berkembang selama masa hidup suatu program. Secara teknis program penuntasan kemiskinan mengubah sistem bantuan tunai menjadi non tunai yang mengacu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima dana bantuan melalui rekening, dimana para KPM dituntut agar memiliki buku tabungan yang diperoleh dari bank. Perubahan sistem penyaluran dana program bantuan tunai menjadi non tunai ini dilakukan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program penyaluran dana sehingga mudah dikontrol, dipantau dan meminimalisir penyimpangan.

Perubahan sistem pencairan dan penyaluran dana menjadi non tunai ternyata masih terjadi problematika terkait dengan penyaluran dana. Karena setiap sistem memiliki siklus pengembangan sistem yang terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan sistem hingga pengoperasian sistem implementasi dari perubahan sistem ini ternyata masih terdapat masalah yang terjadi dalam program ini yaitu adanya penyimpangan dana karena kurangnya pemahaman masyarakat sebagai penerima dalam penggunaan bantuan non tunai. Perubahan ini sedikit mengalami hambatan internal maupun eksternal yang membatasi konfigurasi dalam sistem informasi akuntansi yang memicu tindakan dalam problematik terkait penyaluran dana.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem akuntansi terhadap pencairan dana dan penyaluran pada program keluarga harapan (PKH) dengan judul **“SISTEM AKUNTANSI PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka perlu adanya rumusan yang jelas dan terarah, adapun rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem akuntansi pencairan dan penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) di dinas sosial kabupaten kuantan singingi ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem akuntansi pencairan dan penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) di dinas sosial kabupaten kuantan singingi

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan berfikir, memperluas pengetahuan , baik dalam teori maupun dalam Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

- b. Bagi Dinas Sosial

Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu dan informasi untuk kemajuan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi khususnya para anggotanya. Serta dapat digunakan sebagai acuan sejauh mana Dinas Sosial Kabupaten Kuantan menaatai sistem akuntansi yang berlaku secara umum.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan laporan tugas akhir ini membahas mengenai sistem akuntansi pencairan dana dan penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) pada dinas sosial Kabupaten Kuantan Singingi . didalam pengumpulan data dan informasi penulis menyusun laporan menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1.4.1 lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di jl. Kompleks perkantoran pemda kabupaten kuantan singing, sungai jering, kuantan tengah.

#### 1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan sebagai pedoman adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari dinas sosial Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk wawancara, dokumentasi ,dan observasi guna mengetahui dan mempelajari sistem yang berlaku.
- b. Data sekunder , yaitu data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk yang sudah jadi seperti struktur organisasi dan sejarah singkat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan atas 3 bagian :

#### 1. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 2. Dokumentasi

Yaitu metode dengan cara mengutip secara langsung dari data laporan pertanggungjawaban pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil dokumentasi adalah fil., Sumber tertulis, gambar dan karya-karya monumenental.

#### 3. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk melihat situasi penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan atau peristiwa, waktu, perasaan.

### 1.4.4 Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi langsung instansi yang terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan dan membandingkan suatu keadaan dengan menganalisa serta mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori dengan apa yang terjadi di lapangan hingga di ambil kesimpulan.



## 1.5 Sistematika Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini terbagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun pokok masalah tiap bab tersebut akan penelusuri uraikan dalam garis besarnya saja sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan analisis data.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini membahas tentang sejarah singkat, struktur organisasi, job description, dan visi misi instansi.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini membahas landasan teori dan praktek diantaranya yaitu pengertian sistem, pencairan dana dan penyaluran dana baik secara teori maupun secara praktek.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab merupakan bab penutup yang membuat kesimpulan yang di rangkum dari hasil penelitian terhadap dinas sosial Kabupaten Kuantan Singingi dan juga saran yang diajukan bagi instansi sebagai upaya untuk menunjang kemajuan instansi dimasa yang akan datang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah Singkat dan Dasar Hukum Pembentukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas untuk membantu pemerintah mengatasi berbagai masalah dalam bidang kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya pada kabupaten kuantan singingi.

Dasar Hukum pembentukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
4. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 29).

Dinas sosial kabupaten kuantan singing dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat memiliki jam buka operasional seperti dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jam Buka Operasioanal Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi**

HARI	JAM
Senin – Rabu	07.30 WIB - 16.00 WIB
Kamis – Jumat	07.30 WIB – 16.30 WIB

Dinas sosial kabupaten kuantan singing berkomitmen memberikan pelayanan masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan miskin yang memerlukan bantuan dalam bidang kesejahteraan sosial. Berikut ini gambaran lain mengenai Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Visi dan Misi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi

### 2.1.1 Visi

Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat dalam rangka menunjang kesejahteraan sosial masyarakat dan desa.

### 2.1.2 Misi

1. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya pelayanan .
2. memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan desa dengan cepat, tepat dan terarah.
3. mengembangkan sistem pelayanan melalui informasi dan teknologi yang mudah di akses.
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa melalui pelayanan yang prima.

## 2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen yang di lakukan untuk mengatur seluruh sumber sumber daya yang ada dan di perlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap perusahaan maupun instansi memiliki struktur organisasi dimana tujuannya adalah menggambarkan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing divisi.

Struktur organisasi juga dilengkapi dengan rincian dan uraian tugas tugas yang berguna sebagai pedoman bagi pimpinan dan karyawan dalam menjalankan tugasnya masing masing secara efektif dan efisien dan dapat memudahkan pimpinan untuk mengawasi tugas tugas yang telah dideligasikan dan akan diminta pertanggungj awabannya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

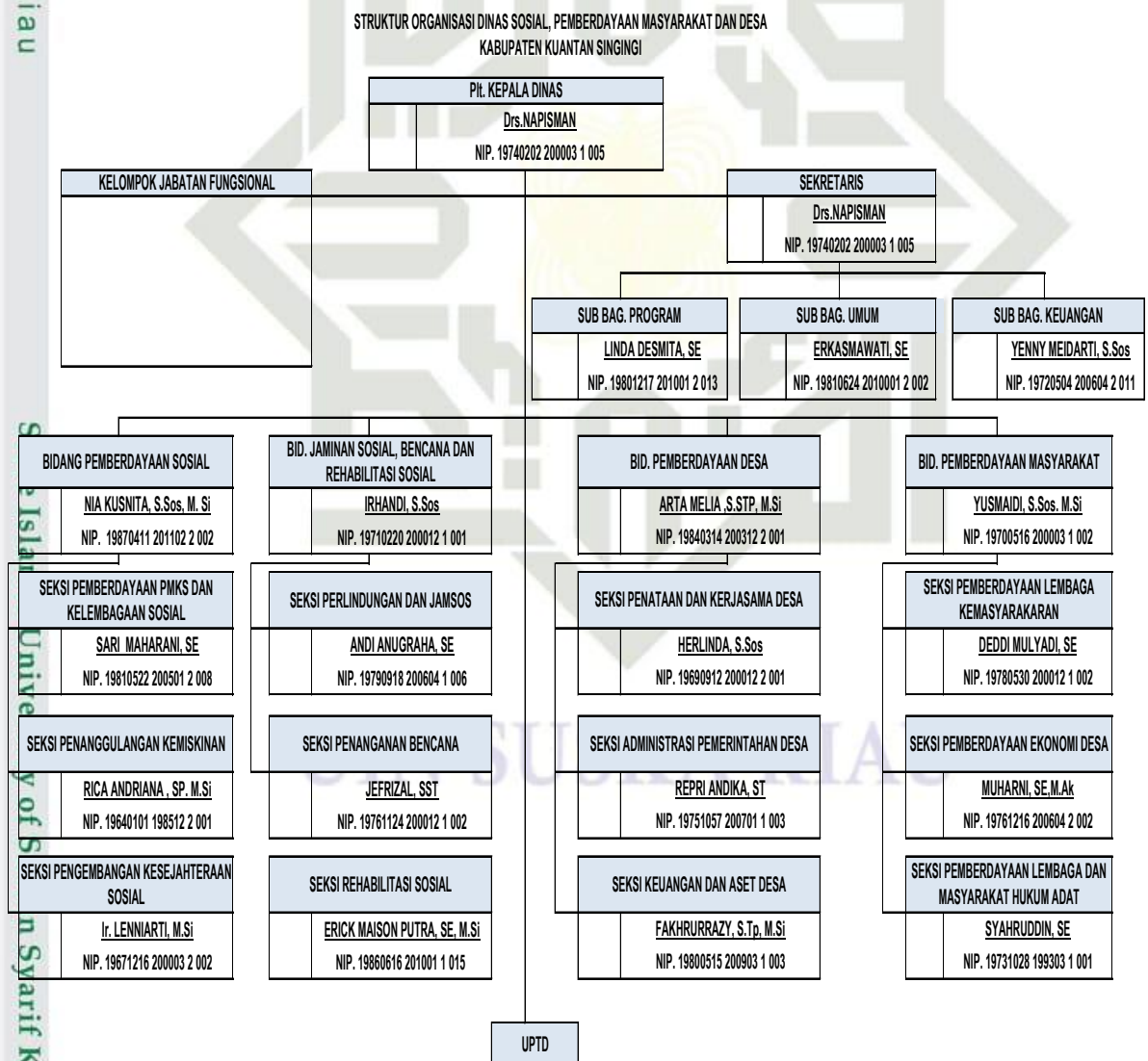
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam organisasi akan selalu terdapat struktur organisasi yang dapat dikatakan sebagai suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis hubungan kerjasama dari setiap orang dalam suatu organisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi diketahui bahwa struktur organisasi dapat dilihat dari gambar berikut ini

**Gambar II.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi**







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi

### Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaannya dijabarkan berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016, yaitu :

#### Kepala Dinas

a. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Perencanaan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pengkoordinasian pelaksanaan dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan fasilitasi dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pelaksanaan kegiatan dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pembinaan dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Pengawasan dibidangsosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengendalian dan monitoring dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pengevaluasian dan pelaporan dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

#### Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, penyusunan kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- Pengelolaan data;
- Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program, dan keuangan;
- Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Penyelenggaraan ketatausahaan;
- Pembinaan kepegawaian;
- Pengelolaan sarana dan prasarana;
- Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- Penyelenggaraan perjalanan dinas;
- Penyelenggaraan fungsi kehumasan;



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penyelenggaraan keprotokoleran;
- Pengelolaan keuangan;
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud huruf b diatas, dibantu oleh Sub Bagian ;

### 1) Sub Bagian Umum

1.1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan ke protokol.

1.2) Rincian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan surat menyurat;
- Mendistribusikan surat menyurat;
- Menggandakan dan menarsipkan surat menyurat;
- Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan perencanaan sarana dan prasarana;
- Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana;
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- Menyiapkan kebutuhan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan kehumasan dan protokoler;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan pelayanan hukum, organisasi dan informasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2) Sub Bagian Program**

2.1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.2) Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :

- Mengumpulkan data dan inventarisasi data;
- Melakukan pengkajian dan analisa data;
- Menyajikan dan menginformasikan data;
- Menyusun rencana program;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana program;
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan data produk hukum daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang program;
- Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) Sub Bagian Keuangan**

3.1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3.2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran keuangan;
- Menyiapkan bahan penggunaan pengeluaran anggaran keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan
- Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi anggaran keuangan;
- Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Sub Bagian Keuangan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Sosial.

b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud huruf b diatas, dibantu oleh Kepala Seksi yaitu

#### 1) Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial

1.1) Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial.

1.2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Sosial
- Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial berdasarkan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;

- Melaksanakan pemberian arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- Melaksanakan pemberdayaan PMKS dan memberikan pelayanan kepada organisasi sosial secara administrasi;
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Organisasi Sosial lainnya, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), Penyuluh Sosial, Panti Asuhan, Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM);
- Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan terhadap organisasi sosial lainnya, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), Penyuluh Sosial, Panti Asuhan, Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM);



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memberikan motivasi kepada organisasi sosial lainnya, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), Penyuluh Sosial, Panti Asuhan, Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM);
- Melaksanakan penilaian pilar-pilar sosial berprestasi;
- Menyusun petunjuk teknis syarat-syarat pendirian organisasi sosial;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap organisasi sosial lainnya, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), Penyuluh Sosial, Panti Asuhan, Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM),
- Melaksanakan Penyuluhan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Menyusun anggaran insentif untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), Penyuluh Sosial, Panti Asuhan, Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM),
- Melaksanakan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN);



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan Peringatan Hari Pahlawan;
- Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Kepala Seksi dan Bidang Lainnya;
- Membantu penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) **Seksi Penanggulangan Kemiskinan**

2.1) Seksi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

2.2) Rincian tugas Seksi Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan ;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Kemiskinan ;
- Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan pemberian arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- Melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan memberikan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Menyelenggarakan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- Menyelenggarakan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Usaha Ekonomi Produktif;
- Menyelenggarakan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Sarana Lingkungan (Sarling);
- Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis syarat-syarat bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Melaksanakan sosialisasi bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Bidang Lainnya;
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial.**

- 3.1) Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- 3.2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:
  - Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
  - Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - Melaksanakan pemberian arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
  - Menyelenggarakan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Kesejahteraan Sosial;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan penghimpunan dan mengintegrasikan seluruh data PMKS yang ada;
- Menyelenggarakan pemberian penghargaan pada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- Melaksanakan pengembangan Taman Makam Pahlawan dan pemakaman umum;
- Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemberian penghargaan pada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Bidang Lainnya;
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Kepala Bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial**

a. Kepala Bidang Jaminan Sosial, Bencanadan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasi, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang jaminan sosial, bencana dan rehabilitasi sosial..

b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial;
  - Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial;
  - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang jaminan sosial, bencana dan rehabilitasi sosial;
  - Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan sosial, bencana dan rehabilitasi sosial;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud huruf b diatas, dibantu oleh Kepala Seksi yaitu.

**1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- 1.1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 1.2) Rincian tugas Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:
  - Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial;
- Melaksanakan pemberian arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Program Keluarga Harapan (PKH);
- Menyelenggarakan regulator, administrator pelaksanaan undian dan pengumpulan uang atau barang;
- Menyelenggarakan asuransi kesejahteraan sosial (Askessos)
- Melaksanakan pengawasan terhadap Program Kartu Indonesia Sehat dan Kesejahteraan (KIS, KPS)
- Melaksanakan Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Bidang Lainnya;
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Penanganan Bencana

2.1) Seksi Penanganan Bencana mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Penanganan Bencana.

2.2) Rincian tugas Seksi Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Penanganan Bencana
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penanganan Bencana;
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan di seksi Penanganan Bencana berdasarkan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial;
- Melaksanakan pemberian arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Taruna Siaga Bencana;
- Menyelenggarakan bantuan sosial bagi korban bencana alam, berupa membangun penanggulangan bencana secara terpadu;
- Melaksanakan penanganan bencana sosial;
- Melaksanakan penanganan bencana alam;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BNPB/D dan BASARNAS;
- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Bidang lainnya;
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3) Seksi Rehabilitasi Sosial.**

- 3.1) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Sosial.
- 3.2) Rincian tugas Seksi Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:
  - Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Rehabilitasi Sosial;
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Rehabilitasi Sosial;
  - Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan di seksi Rehabilitasi Sosial berdasarkan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial, Bencana dan Rehabilitasi Sosial;
  - Melaksanakan pemberian arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karir;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Menyelenggarakan penanganan anak balita terlantar;
- Menyelenggarakan perlindungan dan advokasi sosial anak;
- Melaksanakan pelayanan aksesibilitas lansia dan advokasi
- Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi bekas binaan warga permasyarakatan, penderita HIV/AIDS, dan penyalahgunaan NAPZA;
- Menyelenggarakan penanganan gangguan jiwa;
- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Bidang lainnya;
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Pemberdayaan Desa**

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasi, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Desa.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Desa;
- Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemberdayaan Desa;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Desa;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Desa;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud huruf b diatas, dibantu oleh Kepala Seksi yaitu.

### 1) Seksi Penataan dan Kerjasama Desa

1.1) Seksi Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Penataan dan Kerjasama Desa.

1.2) Rincian tugas Seksi Penataan dan Kerjasama Desa adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Penataan dan Kerjasama Desa;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka penataan desa, penamaan dan kode desa, kewenangan desa, evaluasi perkembangan desa dan kerjasama desa;
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Penataan dan Kerjasama Desa berdasarkan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Desa;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman dalam rangka penataan desa, penamaan dan kode desa, kewenangan desa, evaluasi perkembangan desa dan kerjasama desa;
- Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka penataan desa, penamaan dan kode desa, kewenangan desa, evaluasi perkembangan desa dan kerjasama desa;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan desa, penamaan dan kode desa, kewenangan desa, evaluasi perkembangan desa dan kerjasama desa;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam rangka penataan desa, penamaan dan kode desa, kewenangan desa, evaluasi perkembangan desa dan kerjasama desa;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.**

- 2.1) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa.
- 2.2) Rincian tugas Seksi Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Penataan dan Kerjasama Desa;
- Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka tertib administrasi desa, profil desa, produk hukum desa, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian aparatur Desa dan BPD, peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD;
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Desa;
- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman dalam rangka tertib administrasi desa, profil desa, produk hukum desa, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian aparatur Desa dan BPD, peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD;
- Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka tertib administrasi desa, profil desa, produk hukum desa, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian aparatur Desa dan BPD, peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka tertib administrasi desa, profil desa, produk hukum desa, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian aparatur Desa dan BPD, peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam rangka tertib administrasi desa, profil desa, produk hukum desa, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian aparatur Desa dan BPD, peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Keuangan Aset Desa.

3.1) Seksi Keuangan Aset Desa .mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Keuangan Aset Desa.

3.2) Rincian tugas Seksi Keuangan Aset Desa adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Keuangan Aset Desa;
- Melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa;
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Keuangan Aset Desa berdasarkan kebijakan di bidang pemberdayaan desa;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa;
- Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa;
- Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasi, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud huruf b diatas, dibantu oleh Kepala Seksi yaitu.

### 1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

- 1.1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- 1.2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya),



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat.

- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman dalam rangka Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya), peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya), peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya), peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya), peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa.

2.1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Desa.

2.2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pemberdayaan Ekonomi Desa;
- Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi (UED-SP, BUMDes, SPP, Pasar Desa, Pamsimas dan Lembaga Ekonomi mikro ditingkat desa lainnya), Pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Desa berdasarkan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Desa;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi (UED-SP, BUMDes, SPP, Pasar Desa, Pamsimas dan Lembaga Ekonomi Mikro ditingkat desa lainnya), Pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi (UED-SP, BUMDes, SPP, Pasar Desa, Pamsimas dan Lembaga Ekonomi mikro ditingkat desa lainnya), Pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi (UED-SP, BUMDes, SPP, Pasar Desa, Pamsimas dan Lembaga Ekonomi mikro ditingkat desa lainnya), Pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi (UED-SP, BUMDes, SPP, Pasar Desa, Pamsimas dan Lembaga Ekonomi mikro ditingkat desa lainnya), Pendayagunaan potensi Sumber

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daya Alam (SDA) desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat.

3.1) Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat.

3.2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat;
- Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi penataan dan pengembangan aset adat dan fasilitas penataan desa adat;
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pedoman dalam rangka Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi penataan dan pengembangan aset adat dan fasilitasi penataan desa adat;
- Melaksanakan pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi penataan dan pengembangan aset adat dan fasilitasi penataan desa adat;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi penataan dan pengembangan aset adat dan fasilitasi penataan desa adat;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan dalam rangka Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Hukum Adat, pengembangan kapasitas lembaga dan masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi penataan dan pengembangan aset adat dan fasilitasi penataan desa adat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dinas sosial kabupaten kuantan singingi merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam penyaluran bantuan bantuan dari kementrian sosial Republik Indonesia RI untuk kabupaten/kota. Oleh karena itu , dinas sosial kabupaten kuantan singingi memiliki banyak program bantuan sosial salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Dinas sosial kabupaten kuantan singingi memiliki sebanyak 11.079 KK untuk program keluarga harapan. Yang tersebar di 15 kecamatan kuantan singingi. Dinas sosial kabupaten kuantan singingi mengalami sulitnya penyaluran kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk pencairan dana program keluarga harapan . Di karenakan bank penyalur untuk kabupaten/kota kuantan singingi adalah bank mandiri . tetapi para pendamping PKH bisa menyalurkan dana tersebut lewat ATM, maupun BRI link.
3. Dalam melakukan penyaluran dan pencairan terhadap bantuan sosial khusus program keluarga harapan (PKH) dinas sosial kabupaten kuantan singingi menggunakan sistem non tunai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pada setiap tahap penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tersalurkan maka pendamping akan berkoordinasi langsung dengan kepala keluarga dan korbab PKH untuk mendata permasalahan. Selanjutnya pendamping akan menindak lanjuti permasalahan itu agar dana bantuan dapat disalurkan semuanya.
5. Sistem prosedur perhitungan dana bantuan Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan yang diterapkan oleh kementerian sosial RI.

**4.2 Saran**

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi permasalahan pada saat penyaluran , diperlukan suatu kebijakan perencanaan yang baik dan pendamping harus berkoordinasi yang baik dengan penerima bantuan supaya masalah seperti KKS hilang/ rusak bisa ditangani sebelum penyaluran tahap berikutnya.
2. Sebaiknya pendamping senantiasa melakukan pengecekan kepada kepala keluarga yang sudah mampu untuk dikeluarkan dari penerima bantuan.
3. Untuk meningkatkan kualitas pendamping yang ada dikecamatan sebaiknya korbab selalu melakukan sosialisasi kepada pendamping dan kepala desa. Karena kepala desa berperan untuk mendata masyarakatnya atau mengusulkan masyarakat yang layak untuk mendapatkan dana bantuan ini.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: Andi

Belkaoui, Ahmad, Riahi. 2011. *Dasar-Dasar Accounting untuk Pemula dan Orang Awam*. Jakarta : Ilmu

Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi

Hall, James, A. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat

Harisson, Jr, Welter. T. Horngren, Charles, T.C. Thomas, William. Suwardy, Thenim. 2012. *Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Erlangga

Kementrian Sosial RI. 2020. *Program Keluarga Harapan*

Mahmuzar, M. Hum. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Penerbit Nusa Media

Priharta, Andry. Setyaningsih, Titik, Agus. Rahayu, Dewi, Puji. 2018. *Pengantar Akuntansi Berbasis PSAK*. Bogor : Penerbit in Media

Para , Rahman . 2013 . *Pengantar Akuntansi I* . Jakarta : Erlangga

Romney, M.B dan Steinbart, P.J. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi / Accounting Informatin System*. Jakarta : Salemba Empat

Rudianto . 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Sekretariat Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kabupaten Seragen. 2020. Diakses pada <http://pkhs.ragen.com/tentang-pkh/manfaat-dan-tujuan-pkh/> [15 april 2020]

Waren, carl,S. Reeve, James,M. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembaran Panduan Wawancara

### **SISTEM AKUNTANSI PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Informan : Sisrianto, S.IP, M.SI

Jabatan : Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Kuantan Singingi

Tempat : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi

Tanggal : 12 Februari 2020

Waktu : 10.00 WIB

1. Bagaimana sejarah berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban : Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar Hukum pembentukan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada beberapa peraturan :

- a) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016
- d) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan serta fungsi tata kerja dinas sosial.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa saja bantuan sosial yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi?

Jawaban : untuk bantuan sosial , ada 8 program perlindungan sosial di antaranya : PKH, PBI JKN KIS, ASPD, ASLUT, ODGJ, BPNT, KUBE, RS-RTLH

Bagaimana pendamping PKH mengenali KPM untuk dijadikan penerima bantuan sosial yang tepat?

Jawaban : pendamping akan mendata kepala keluarga dan berkoordinasi dengan kepala desa untuk memilih keluarga yang tepat menerima bantuan PKH. Kemudian pendamping juga melihat keluarga itu sesuai dengan komponen PKH atau tidak.

4. Sistem apakah yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyaluran bantuan PKH?

Jawaban : Sistem penyaluran bantuan PKH yang digunakan adalah sistem non tunai. Yang disalurkan melalui bank mandiri. Uang bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing KPM.

Apa kendala yang dihadapi oleh KPM dan pendamping selama penyaluran PKH?

Jawaban : kendala yang di hadapi oleh pendamping selama penyaluran adalah sedikitnya cabang bank mandiri dan hanya ada di ibu kota kabupaten saja. Kemudian pendamping yang jauh dari ibu kota kabupaten harus menyalurkan bantuannya di bri link, atau agen bri yang bisa menyalurkan bantuan PKH



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana solusi dari masalah yang timbul selama penyaluran PKH?

Jawaban : Dana bantuan PKH yang belum tersalurkan dan KPM yang mengalami masalah dalam penyaluran, maka pendamping akan berkoordinasi dengan korkab dan bank penyalur . seperti saldo nol dan KKS yang hilang. Kemudian pendamping akan melakukan tindak lanjut masalah tersebut hingga dana bisa di salurkan kepada KPM.

Apakah bisa terlihat perubahan-perubahan KPM setelah adanya PKH?

Jawaban : bisa , contohnya KPM mudah dalam mencukupi kebutuhan pribadi. Dalam hal pendidikan dan kebutuhan anaknya.

#### 8. Bagaimana tindak lanjut dari KPM yang sudah mampu?

Jawaban : KPM yang sudah mampu akan dikeluarkan ( graduasi mandiri ) karena sudah dinyatakan sejahtera dan tidak berhak lagi menerima bantuan PKH. Pendamping akan berkoordinasi dengan korkab dan kepala keluarga yang akan di graduasi.

Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan PKH?

Jawaban : peran Dinas sosial dalam penyaluran bantuan PKH adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran. Kemudian dana akan langsung ke kartu jika jadi tidak ada intervensi dari dinas sosial. Dinas melalui pendamping PKH hanya menyampaikan jadwal penyaluran ke KPM PKH.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 : Foto kegiatan wawancara





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3 : foto penyaluran PKH



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4 : foto kunjungan ke rumah KPM



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 : foto KPM yang Graduasi Mandiri





## 1.1 Laporan Rekap Penyaluran Bantuan PKH 2019 Tahap Pertama

REKAP REGIONAL SUMATERA

Tanggal : 04 JULI 2019

REKAP PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2019										
NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	TAHAP I						LEMBAGA BAYAR	KET
			SP2D		Penyaluran Tabungan		Bansos Tidak Masuk			
							Tabungan			
			KPM (orang)	Nominal	KPM (orang)	%	KPM (orang)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	KUANTAN SINGINGI	15	11.246	15.068.175.000	11.236	99,91%	10	0,09%	MANDIRI	
TOTAL		15	11.246	15.068.175.000	11.236	99,91%	10	0,09%		

## 1.2 Laporan tindak lanjut masalah yang tidak tersalurkan tahap pertama

Tanggal : 04 JULI 2019

Tanggal : 04 JULI 2020

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	JUMLAH KPM BERMASALAH	TINDAK LANJUT DAERAH	REKOMENDASI TINDAKLANJUT	BANK PENYALUR	KET
1	RIAU	KUANTAN SINGINGI	BELUM TERIMA KKS DAN BUTAB	1	PENDAMPING SUDAH BERUPAYA MEMINTA KKS KE BANK		MANDIRI	TAHAP I
			SALDO NOL				MANDIRI	TAHAP I
			KKS DOUBLE				MANDIRI	TAHAP I
			KKS HILANG/ RUSAK	1	SUDAH DIBANTU PENGUSULAN KARTU BARU OLEH PENDAMPING		MANDIRI	TAHAP I
			KPM MENINGGAL	2	SUDAH DI NON ELIGIBLEKAN PENDAMPING		MANDIRI	TAHAP I
			KPM NE	6	NON ELIGIBLE HABIS KOMPONEN/ GRADUASI ALAMIAH		MANDIRI	TAHAP I
			PINDAH ALAMAT TIDAK DIKETAHUI				MANDIRI	TAHAP I
				10				

## 1.3 Laporan bantuan belum tersalurkan tahap pertama

REKAP BNBA KPM  
BANTUAN BELUM TERSALURKAN

TAHAP : I  
 TAHUN : 2019  
 KABUPATEN : KUANTAN SINGINGI  
 UPDATE TGL PELAPORAN : 04 JULI 2019  
 KORKAB : SISRIANTO, S.IP, M.Si

NO	NO PESERTA	NAMA PENGURUS	NO REK	JML BANTUAN	DESA	KEC	KAB	PROV	PENDAMPING	KET
1	140104016050134	RUSLAINI	1080016790900	1.150.000	BANJAR LOPAK	BENAI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	BETI HARTATI	MENINGGAL TIDAK ADA AHLI WARIS
2	140106016050194	AYU RIATHI	1080016347065	1.600.000	KOTO CERENTI	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
3	140106016050182	ERMA SUSANTI	1080016399108	1.825.000	PESIKAIAN	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
4	140106016050172	YULIMARNI	1080016316433	1.000.000	PESIKAIAN	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
5	140106016050306	AHMAD J	1080016790967	1.150.000	TANJUNG MEDAN	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
6	140106016050238	NURHAYANUN	1080016785645	1.150.000	PASAR CERENTI	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
7	140101116050212	ELPI PARSELI	1080016351083	1.050.000	MUDIK ULO	HULLU KUANTAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	FEBRA ARNITA NASUTION	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
8	140101016002551	INDRA YANI	1080015563613	1.525.000	KINALI	KUANTAN MUDIK	KUANTAN SINGINGI	RIAU	RIZA FITRIANI	KKS HILANG. DALAM PROSES PENGURUSAN
9	140105116050110	SADATI	1080016791486	1.150.000	PADANG KUNIK	PANGEAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	NURUL KHASANAH	MENINGGAL TIDAK ADA AHLI WARIS
10	140102116050662	TUMIRAH		1.150.000	SUKA MAJU	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	BERLIANTO, SH	BELUM DAPAT KKS, BUTAB. LANSIA. TIDAK PUNYA KTP, KK
				12.750.000						

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### 1.4 Laporan update bantuan yang sudah tersalurkan tahap pertama

UPDATE BI UPDATE BNBA TERSALURKAN

TAHAP : I  
TAHUN : 2019  
KABUPATEN : KUANTAN SINGINGI  
UPDATE TGL PELAPORAN : 30/08/2019  
KORAB : SISRIANTO, S.IP, M.SI

NO	NO PESERTA	NAMA PENGURUS	NO REK	JML BANTUAN	DESA	KEC	KAB	PROV	PENDAMPING	KET
1	140104016050134	RUSLIANI	1080016790900	1.150.000	BANJAR LOPAK	BENAI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	BETI HARTATI	MENINGGAL, TIDAK ADA AHLI WARIS
2	140106016050194	AYU RIATHI	1080016347065	1.600.000	KOTO CERENTI	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
3	140106016050182	ERMA SUSANTI	1080016399108	1.825.000	PESIKAJAN	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
4	140106016050172	YULIMARNI	1080016316433	1.000.000	PESIKAJAN	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
5	140106016050305	AHMAD J	1080016790967	1.150.000	TANJUNG MEDAN	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
6	140106016050238	NURHAYANUN	1080016785645	1.150.000	PASAR CERENTI	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	CANDRA IRAWAN, SE	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
7	14010116050212	ELPI PARSELI	1080016511083	1.050.000	MUDIK ULO	HULU Kuantan	KUANTAN SINGINGI	RIAU	FEBRA ARINITA NASUTION	NON ELIGIBLE, TIDAK ADA KOMPONEN PKH
8	140101016002551	INDRA YANI	1080015563613	1.525.000	KINALI	Kuantan Mudik	KUANTAN SINGINGI	RIAU	RIZA FITRIANI	KKS HILANG. DALAM PROSES PENGURUSAN
9	140105116050110	SADATI	1080016791486	1.150.000	PADANG KUNIK	PANGEAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	NURUL KHASANAH	MENINGGAL, TIDAK ADA AHLI WARIS
10	140102116050362	TUMIRAH		1.150.000	SUKA MAJU	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	BERLIANTO, SH	TELAH PENYALURAN
				12.750.000						

## 1.5 Laporan rekap penyaluran bantuan PKH 2019 tahap kedua

REKAP REGIONAL SUMATERA

Tanggal : 04 JULI 2019

REKAP PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2019										
NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	TAHAP II						LEMBAGA BAYAR	KET
			SP2D		Penyaluran Tabungan		Bansos Tidak Masuk Tabungan			
			KPM (orang)	Nominal	KPM (orang)	%	KPM (orang)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	KUANTAN SINGINGI	15	1.221	8.910.975.000	11.210	99,90%	11	0,09%	MANDIRI	
2	KUANTAN SINGINGI		1	1.200.000	1	100,00%	0	0,00%	BRI	
	TOTAL	15	11.222	8.912.175.000	11.211	99,91%	11	0,09%		

### 1.6 Laporan tindak lanjut masalah yang tidak tersalurkan tahap kedua

Tanggal : 04 JULI 2019

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	JUMLAH KPM BERMASALAH	TINDAK LANJUT DAERAH	REKOMENDASI TINDAKLANJUT	BANK PENYALUR	KET
1	RIAU	Kuantan Singingi	BELUM TERIMA KKS DAN BUTAB	1	PENDAMPING SUDAH BERUPAYA MEMINTA KKS KE BANK		MANDIRI	TAHAP II
			SALDO NOL	7	REKAP DATA, LAPORKAN DI REKON TAHAP II		MANDIRI	TAHAP II
			KKS DOUBLE	0			MANDIRI	TAHAP II
			KKS HILANG/ RUSAK	2	SUDAH DIBANTU PENGUSULAN KARTU BARU OLEH PENDAMPING		MANDIRI	TAHAP II
			KPM MENINGGAL	1	AKAN DI NON ELIGIBLEKAN PENDAMPING		MANDIRI	TAHAP II
			KPM NE	0			MANDIRI	TAHAP II
			PINDAH ALAMAT TIDAK DIKETAHUI	0			MANDIRI	TAHAP II
				11				



## 1.7 Laporan bantuan belum tersalurkan tahap kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

REKAP BNBA KPM  
BANTUAN BELUM TERSALURKAN

TAHAP  
TAHUN  
KABUPATEN

UPDATE TGL PELAPORAN  
KORAB

: II  
: 2019  
: KUANTAN SINGINGI  
: 04 JULI 2019  
: SISRIANTO, S.IP, M.Si

No	NoPeserta	NAMA PENGURUS	NO REK	JML BANTUAN	Kelurahan	Kec	Kab/Kota	Prov	NamaPendamping	Keterangan
1	140106016002212	HAMNAH	1080015560627	600.000	TELUK PAUH	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	RISDIAN NELLY, SE	KPM MENINGAL DUNIA, TIDAK ADA AHLI WARIS
2	140101116050036	M SAID	1080016420136	600.000	SUNGA ALAH	HULLU KUANTAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	FEBRA ARNITA NASUTION, S.Sos	KPM SALDO NOL
3	140101116050269	BADU RAHMAN	1080016790793	600.000	TANJUNG	HULLU KUANTAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	FEBRA ARNITA NASUTION, S.Sos	KPM SALDO NOL
4	140103116050043	WATI	1080016345440	225.000	KAMPUNG BARU SENTAJO	SENTAJO RAYA	KUANTAN SINGINGI	RIAU	DELVIA SARI, S.Sos, M.Si	KPM SALDO NOL
5	140102016050040	SIDAR	1080016782733	1.100.000	PANGKALAN INDRAMUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI, S.Pd	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
6	140102016050048	JULAI	1080016782733	600.000	PANGKALAN INDRAMUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI, S.Pd	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
7	140102016050619	ROSLAINI	1080016684624	600.000	KEBUN LADO	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI, S.Pd	KPM SALDO NOL
8	140102116001812	YAYAN SATIAH	1080015603260	600.000	SUNGA BULUH	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	IRWAN SISKI, SE.I	KPM SALDO NOL
9	140102116050099	DEWI KOMARYATI	1080016337009	225.000	SUNGA BULUH	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	IRWAN SISKI, SE.I	KPM SALDO NOL
10	140102116050097	RUKIYAH	1080016686553	1.200.000	SUNGA BULUH	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	IRWAN SISKI, SE.I	KPM SALDO NOL
11	140102116050662	TUMIRAH		600.000	SUKAMAJU	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	BERLIANTO, SH	KPM BELUM TERIMA KKS, BUTAB. (BANK TIDAK MAU MEMBERIKAN KARENA KPM LANSIA INI TIDAK PUNYA KT
				6.950.000						

## 1.8 Laporan update bantuan yang sudah tersalurkan tahap kedua

UPDATE BNBA BANTUAN TERSALURKAN

TAHAP  
TAHUN  
KABUPATEN

UPDATE TGL PELAPORAN  
KORAB

: II  
: 2019  
: KUANTAN SINGINGI  
: 30/08/2019  
: SISRIANTO, S.IP, M.Si

No	NoPeserta	NAMA PENGURUS	NO REK	JML BANTUAN	Kelurahan	Kec	Kab/Kota	Prov	NamaPendamping	Keterangan
1	140106016002212	HAMNAH	1080015560627	600.000	TELUK PAUH	CERENTI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	RISDIAN NELLY, SE	KPM MENINGAL DUNIA, TIDAK ADA AHLI WARIS
2	140101116050036	M SAID	1080016420136	600.000	SUNGA ALAH	HULLU KUANTAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	FEBRA ARNITA NASUTION, S.Sos	TELAH TERSALURKAN
3	140101116050269	BADU RAHMAN	1080016790793	600.000	TANJUNG	HULLU KUANTAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	FEBRA ARNITA NASUTION, S.Sos	TELAH TERSALURKAN
4	140103116050043	WATI	1080016345440	225.000	KAMPUNG BARU SENTAJO	SENTAJO RAYA	KUANTAN SINGINGI	RIAU	DELVIA SARI, S.Sos, M.Si	TELAH TERSALURKAN
5	140102016050040	SIDAR	1080016782733	1.100.000	PANGKALAN INDRAMUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI, S.Pd	TELAH TERSALURKAN
6	140102016050048	JULAI	1080016782733	600.000	PANGKALAN INDRAMUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI, S.Pd	TELAH TERSALURKAN
7	140102016050619	ROSLAINI	1080016684624	600.000	KEBUN LADO	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI, S.Pd	TELAH TERSALURKAN
8	140102116001812	YAYAN SATIAH	1080015603260	600.000	SUNGA BULUH	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	IRWAN SISKI, SE.I	TELAH TERSALURKAN
9	140102116050099	DEWI KOMARYATI	1080016337009	225.000	SUNGA BULUH	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	IRWAN SISKI, SE.I	TELAH TERSALURKAN
10	140102116050097	RUKIYAH	1080016686553	1.200.000	SUNGA BULUH	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	IRWAN SISKI, SE.I	TELAH TERSALURKAN
11	140102116050662	TUMIRAH		600.000	SUKAMAJU	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	BERLIANTO, SH	TELAH TERSALURKAN
				6.950.000						

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1.9 Laporan rekap penyaluran bantuan PKH 2019 tahap ketiga

REKAP REGIONAL SUMATERA  
Tanggal : 04 JULI 2019

REKAP PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2019										
NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	TAHAP III						LEMBAGA BAYAR	KET
			SP2D		Penyaluran Tabungan		Bansos Tidak Masuk			
							Tabungan			
			KPM (orang)	Nominal	KPM (orang)	%	KPM (orang)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	KUANTAN SINGINGI	15	11.177	9.828.100.000	11.167	99.9%	10	0.1%	MANDIRI	
2	KUANTAN SINGINGI		1	1.200.000	1	100%			BRI	
TOTAL		15	11.178	9.829.300.000	11.168					

## 1.10 Laporan tindak lanjut masalah yang tidak tersalurkan tahap ketiga

Tanggal : 04 JULI 2019

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	PERMASALAHAN	JUMLAH KPM BERMASALAH	TINDAK LANJUT DAERAH	REKOMENDASI TINDAKLANJUT	BANK PENYALUR	KET
1	RIAU	KUANTAN SINGINGI	BELUM TERIMA KKS DAN BUTAB				MANDIRI	TAHAP III
			SALDO NOL	1	REKAP DATA, LAPORKAN DI REKON TAHAP III		MANDIRI	TAHAP III
			KKS DOUBLE				MANDIRI	TAHAP III
			KKS HILANG/ RUSAK	9	SUDAH DIBANTU PENGUSULAN KARTU BARU OLEH PENDAMPING		MANDIRI	TAHAP III
			KPM MENINGGAL				MANDIRI	TAHAP III
			KPM NE				MANDIRI	TAHAP III
			PINDAH ALAMAT TIDAK DIKETAHUI				MANDIRI	TAHAP III
				10				

## 1.11 Laporan bantuan belum tersalurkan tahap kedua

REKAP BNBA KPM  
BANTUAN BELUM TERSALURKAN  
TAHAP : III  
TAHUN : 2019  
KABUPATEN : KUANTAN SINGINGI  
UPDATE TGL PELAPORAN : 04 JULI 2019  
KORAB : SISRIANTO, S.JP, M.Si

NO	NO PESERTA	NAMA PENGURUS	NO REK	JML BANTUAN	DESA	KEC	KAB	PROV	PENDAMPING	KET
1	140106116050290	SARIATI	1080016410947	1.200.000	KETAPING JAYA	INUMAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	DEDI AMRIZAL	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
2	140102016002286	BAHAGIA	1080015550909	675.000	PANGKALAN INDRAMUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
3	140102016050044	INDAU	1080016686959	600.000	PANGKALAN INDRAMUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
4	140102016050048	JULAI	1080016789498	600.000	PANGKALAN INDRAMUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
5	140102016050040	SIDAR	1080016782733	1.100.000	PANGKALAN INDRAMUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
6	140102016050002	TINGIN	1080016791874	600.000	PANGKALAN INDRAMUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
7	140101016002551	INDRA YANI	1080015563613	1100000	KINALI	KUANTAN MUDIK	KUANTAN SINGINGI	RIAU	RIZA FITRIANI	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
8	122000044636752	SOIMAH	1080015593024	725000	SUKAMAJU	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	EVI YULIDES	SALDO NOL
9	122000044367617	NURLAILASARI	1080015579486	1425000	SUNGGAI BULUH	SINGINGI HILIR	KUANTAN SINGINGI	RIAU	DELFI LIANI	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
10	122000045262908	SRI WARSINI	1080015593883	450000	BERINGIN JAYA	BENAI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	DEWI OKTAPIA	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
				8.475.000						

1. Hak Cipta  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1.12

## Laporan update bantuan yang sudah tersalurkan tahap kedua

UPDATE BNBA TERSALURKAN

TAHAP

: III

TAHAP

: 2019

KABUPATEN

: KUANTAN SINGINGI

UPDATE TGL PELAPORAN

: 30/08/2019

KORPORASI

: SISRIANTO, S.IP, M.Si

NO	NO PESERTA	NAMA PENGURUS	NO REK	JML BANTUAN	DESA	KEC	KAB	PROV	PENDAMPING	KET
1	140106116050290	SARIATI	1080016410947	1.200.000	KETAPING JAYA	INUMAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	DEDI AMRIZAL	BELUM DAPAT KKS. PROSES PENGALUAN DI BANK
2	140102016002286	BAHAGIA	1080015550909	675.000	PANGKALAN INDARUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	TELAH TERSALURKAN
3	140102016050044	INDAU	1080016686959	600.000	PANGKALAN INDARUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	TELAH TERSALURKAN
4	140102016050048	JULAI	1080016789498	600.000	PANGKALAN INDARUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	TELAH TERSALURKAN
5	140102016050040	SIDAR	1080016782733	1.100.000	PANGKALAN INDARUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	TELAH TERSALURKAN
6	140102016050002	TINGIN	1080016791874	600.000	PANGKALAN INDARUNG	SINGINGI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	AHMAD FADLI	TELAH TERSALURKAN
7	140101016002551	INDRA YANI	1080015563613	1.100.000	KINALI	KUANTAN	KUANTAN SINGINGI	RIAU	RIZA FITRIANI	TKL KKS HILANG. PROSES PENGALUAN DI BANK
8	122000044636752	SOIMAH	1080015593024	725.000	SUKAMAJU	SINGINGI H	KUANTAN SINGINGI	RIAU	EVI YULIDES	TELAH TERSALURKAN
9	122000044367617	NURLAILASARI	1080015579486	1425.000	SUNGAI BULUH	SINGINGI H	KUANTAN SINGINGI	RIAU	DELFI LIANI	TELAH TERSALURKAN
10	122000045262908	SRI WARSINI	1080015593883	450.000	BERINGIN JAYA	BENAI	KUANTAN SINGINGI	RIAU	DEWI OKTAPIA	KKS RUSAK. PROSES PEMBUATAN BARU DI BANK
				8.475.000						

## 1.13 Data penerima bantuan PKH 2020

Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 2020  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No	Kecamatan	Jumlah KK	JUMLAH ANAK SD	JUMLAH ANAK SMP	JUMLAH ANAK SMA	JUMLAH BUMIL	JUMLAH USIA DINI	JUMLAH LANSIA	JUMLAH DISABILITAS	JUMLAH ART
1	BENAI	547	297	172	178	-	164	139	19	1.009
2	CERENT	656	463	286	258	1	302	117	14	1.497
3	GUNUNG TOAR	623	454	220	245	4	248	60	9	1.272
4	HULU KUANTAN	511	317	170	130	5	178	118	14	948
5	INUMAN	725	459	294	291	2	268	187	66	1.619
6	KUANTAN HILIR	386	227	132	105	1	70	104	22	679
7	KUANTAN HILIR SEBERANG	284	133	71	42	-	82	111	9	465
8	KUANTAN MUDIK	867	588	392	360	1	360	138	26	1.916
9	KUANTAN TENGAH	1.109	695	439	372	1	359	190	55	2.174
10	LOGAS TANAH DARAT	719	469	216	194	2	194	126	9	1.227
11	PANGKAN	1.199	733	439	416	11	398	235	60	2.345
12	PUCUK BANTAU	379	256	162	105	-	121	31	4	687
13	SENTAU RAYA	892	537	282	254	2	288	184	11	1.621
14	SINGINGI	1.086	688	353	308	11	406	139	34	1.966
15	SINGINGI HILIR	1.096	790	394	322	2	434	133	10	2.148
	Grand Total	11.079	7.106	4.022	3.580	43	3.872	2.012	362	21.573

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI  
 TELP (0760) 561631-561632 KODE POS 29562  
**TELUK KUANTAN**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 460/Dissos-PMD/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SISRIANTO, S.IP, M.Si**  
 NIK : 1409032205880001  
 Jabatan : Koordinator PKH Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **SELLI MARSELA**  
 NIK : 1409087003990001  
 Alamat : RT. 008/ RW 001. Desa Koto Baru. Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Riau  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 NIM : 01770423464  
 Pendidikan : D III  
 Jurusan : Akuntansi  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN SUSKA RIAU  
 Judul Skripsi : SISTEM AKUNTANSI PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul "SISTEM AKUNTANSI PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI" di Sekretariat Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Kuantan Singingi. Serta telah melakukan wawancara dan pengumpulan data kepada Pendamping PKH, Koordinator PKH, Kepala Bidang Jaminan Sosial, Kepala Seksi Jaminan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Teluk Kuantan, 14 Mei 2020

Mengetahui,

Koordinator PKH  
Kabupaten Kuantan Singingi

**SISRIANTO, S.IP, M.Si**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ci



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Selli Marsela, di lahirkan di Lipat Kain 30 Maret 1999, Ayahanda bernama Khairul Usman dan Ibunda bernama Simarni. Penulis anak kedua dari tiga bersaudara. Jenjang Pendidikan dimulai dari SDN 019 Koto Baru, dari tahun 2005 dan lulus 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 5 Kampar dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Singingi Hilir dari 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi** “ dibawah bimbingan ibu Identiti, SE, M.Ak, Ak, CA dan tanggal 19 Mei 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).

UIN SUSKA RIAU